



Analisis Media Sosial pada Penyebaran Berita Bohong Terkait BSU di Indonesia

Sello Satrio*, Alfian Pratama

Universitas Buddhi Dharma

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebaran berita bohong terkait Bantuan subsidi upah (BSU) yang dilakukan di media sosial dalam platform Facebook dan menanggulangi penyebaran berita bohong yang dilakukan lembaga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan dan Kantor Pos Indonesia (Pospay) terkait bantuan subsidi upah (BSU). Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode netnografi yang digunakan untuk menganalisis budaya dan interaksi masyarakat di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengatasi berita palsu tentang bantuan subsidi upah BSU di Facebook membutuhkan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga lokal. Pemerintah memberikan kedaulatan resmi, organisasi masyarakat sipil memperkuat peran masyarakat, sedangkan lembaga lokal mempercepat distribusi klarifikasi di tingkat daerah. Dengan kerja sama yang kolaboratif seperti ini, ekosistem informasi yang sehat dapat dibangun sehingga masyarakat lebih tahan terhadap misinformasi.

Kata kunci: Disinformasi, Hoaks, BSU, Facebook Indonesia, Netnografi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/interaction.v2i2.4838>

*Correspondence: Sello Satrio

Email: sellosatrio.scholar@gmail.com

Received: 18-08-2025

Accepted: 25-08-2025

Published: 31-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study looks into how false information about the Wage Subsidy Assistance (BSU) spreads on Facebook and how the Ministry of Manpower (Kemnaker), the Social Security Agency for Employment (BPJS Ketenagakerjaan), and Pos Indonesia (Pospay) deal with this issue. The research uses a descriptive qualitative method, specifically netnography, to understand the culture and interactions of people in online spaces. The results show that stopping false news about BSU on Facebook needs teamwork between the government, civil society groups, and local organizations. The government has the power to act, civil society helps involve the community, and local groups can quickly spread correct information in their areas. By working together, these groups can build a better environment for accurate information, helping people become more able to spot and resist false news.

Keywords: Disinformation, Hoax, BSU, Facebook Indonesia, Netnography

Pendahuluan

Ekonomi yang tidak menentu membuat banyak masyarakat mengalami banyak kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut sangat besar memicu kecenderungan peristiwa negatif di tengah masyarakat, seperti pencurian, penipuan dan sebagainya. Situasi seperti ini membuat cela bagi mereka yang memiliki kemampuan atau keahlian tertentu untuk digunakan secara tidak baik, seperti pada penipuan digital. Belum lama ini tepatnya di bulan Juni 2025 telah terdeteksi penipuan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan, dan Kantor Pos Indonesia (Pospay) terkait penipuan digital Bantuan subsidi upah (BSU) dilakukan dengan cara penyebaran

berita hoaks di akun WhatsApp, YouTube, Facebook, dan Instagram yang mengatas namakan akun resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan, dan Kantor Pos Indonesia (Pospay).

Melihat fenomena transformasi ekosistem informasi di Indonesia, yang didukung oleh penetrasi internet sebesar 79,5% pada awal 2024 dan lebih dari 221 juta pengguna, membuat media sosial menjadi bagian penting dari infrastruktur informasi sehari-hari. Hal ini membuat masifnya masyarakat di Indonesia terperangkap oleh penipuan digital terkait program BSU. Terjadinya penipuan digital seperti ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan, dan Kantor Pos Indonesia (Pospay) mengambil tindakan yang berfokus pada edukasi masyarakat agar tidak mudah menjadi korban dan memberikan informasi resmi terkait penyaluran Bantuan subsidi upah (BSU).

Beberapa badan dari pemerintah pusat seperti Komdigi, pemerintah daerah seperti Jabar Saber Hoaks (JSH) dan organisasi masyarakat sipil seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)/TurnBackHoax mulai bertindak untuk membantu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan, dan Kantor Pos Indonesia (Pospay) melakukan edukasi dan sosialisasi digital terkait Bantuan subsidi upah (BSU).

Dalam konteks ini, program Bantuan subsidi upah (BSU) sering menjadi target penyebaran informasi palsu dan tautan tidak resmi di Facebook. Contohnya adalah "*link* pendaftaran" yang menyerupai situs resmi, "cek status tanpa NIK", serta klaim palsu soal besaran bantuan Rp1,7 juta. Beberapa pemeriksa fakta seperti Komdigi, TurnBackHoax (Mafindo), dan Jabar Saber Hoaks menemukan pola yang sama terus menerus sejak Juni hingga Agustus 2025.

Secara teori, fenomena ini sesuai dengan penelitian global yang menunjukkan bahwa kebohongan berpindah lebih cepat, lebih jauh, dan lebih luas dibandingkan kebenaran, yang didorong oleh keanehan dan emosi (Vosoughi dkk., 2018). Sementara itu, kerentanan seseorang terhadap informasi palsu seringkali karena kurangnya kemampuan berpikir secara analitis, bukan hanya karena prasangka politik (Pennycook & Rand, 2019). Kerangka *information disorder* (Wardle & Derakhshan, 2017) memberikan istilah untuk membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang akan kita gunakan sebagai kacamata dalam menganalisisnya.

Penelitian tentang hoaks di Indonesia selama ini sudah cukup banyak, terutama yang membahas isu-isu politik seperti pemilu, serta bidang kesehatan seperti vaksin dan pandemi. Namun, ada satu hal yang masih jarang didalami secara mendalam, yaitu penipuan berkaitan dengan program bantuan sosial, seperti Bantuan subsidi upah (BSU), terutama yang beredar di platform Facebook. Penelitian yang ada biasanya hanya dalam bentuk laporan ringkasan, seperti menghitung jumlah hoaks per tahun atau per platform.

Laporan seperti ini berguna untuk memahami seberapa luas masalahnya, namun belum bisa menjelaskan cara-cara spesifik yang digunakan oleh pelaku. Contohnya, bagaimana mereka menyerupai lembaga resmi seperti Kementerian Ketenagakerjaan atau BPJS, lalu mengarahkan korban ke halaman pendaftaran palsu yang akhirnya meminta data pribadi korban. Padahal, penelitian dengan pendekatan kualitatif yang lebih detail, memahami konten, pelaku, serta fitur platform yang memudahkan beredarnya hoaks, sangat penting untuk memahami cara hal ini terjadi di lapangan.

Pendekatan ini tidak hanya membantu menjelaskan mengapa orang mudah percaya dan menyebarkan hoaks ini, tetapi juga memberi dasar dalam merancang intervensi yang tepat, baik dari sisi kebijakan, edukasi masyarakat, maupun pengawasan media sosial.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa studi tentang hoaks di bidang kesejahteraan sosial, khususnya terkait BSU di Facebook, masih terbatas dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Melalui penelitian ini penulis menyempitkan pemberitaan bohong di platform sosial media facebook. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian yang pada penelitian ini untuk 1) mengetahui pola komunikasi dalam menyebarkan berita bohong di media sosial facebook dan 2) mengetahui lembaga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan dan Kantor Pos Indonesia (Pospay) menanggulangi berita bohong yang tersebar di media sosial facebook terkait Bantuan subsidi upah (BSU)

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus netnografi untuk mengeksplorasi secara mendalam proses pola komunikasi dalam menyebarkan berita bohong yang tersebar di platform media sosial Facebook.

Data dikumpulkan melalui pengamatan media sosial yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) pada situs basis data Bernama "TurnBackHoax", dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat melalui platform berbasis *website* bernama "Jabar Saber Hoaks" selama bulan Juni hingga Agustus 2025

Analisa ini menggunakan paradigma konstruktivis yang mengatakan bahwa kebenaran sosial dibuat melalui interaksi antara pengguna, platform, dan institusi. Facebook dipilih karena tiga alasan utama: pertama, jumlah pengguna yang besar dan platform ini digunakan untuk berita serta urusan administrasi; kedua, infrastruktur grup dan halaman memudahkan penyebaran tautan secara cepat; ketiga, para pemeriksa fakta sering menemukan jejak Facebook dalam kasus-kasus penipuan BSU.

Hasil dan Pembahasan

Pola Komunikasi Dalam Menyebarkan Berita Bohong di Media Sosial Facebook

Banyak tautan palsu menyerupai Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau Pospay, lengkap dengan logo dan bahasa resmi yang sama. Mereka mengklaim hal-hal seperti “daftar atau cek BSU tanpa NIK”, “pencairan Agustus 2025”, atau “BSU senilai Rp1,7 juta”, tetapi semua pernyataan tersebut telah ditolak oleh lembaga resmi dan pemeriksa fakta.

Contoh konkret:



Gambar 1. pemberitaan terkait penipuan BSU senilai Rp.1.700.000, pada postingan situs basis data “TurnBackHoax”

Sumber: <https://turnbackhoax.id/2025/07/22/penipuan-kemenaker-salurkan-bsu-sebesar-rp17-juta/>

1. “Tautan registrasi BSU 2025 tahap II diunggah oleh akun Facebook “INFO Terkini”; nyatanya proses registrasi tidak bisa dilakukan sendiri dan tautan tersebut bukan berasal dari domain resmi.
2. “Tautan Pospay untuk mengecek pencairan BSU” mengarahkan pengguna ke *form* di luar aplikasi; sebenarnya pengecekan resmi harus dilakukan melalui aplikasi Pospay atau jalur verifikasi yang sudah ditentukan.
3. “Kemnaker menyalurkan BSU Rp1,7 juta” narasi palsu yang memperbesar jumlah dari kebijakan sebenarnya (Rp300.000 per bulan Juni – Juli dirapel).

Dari segi teori *novelty* dan emosi, hal baru dan perasaan seperti harapan mendapatkan uang cepat mendorong orang untuk berbagi informasi—sama seperti cara berita palsu menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada berita benar.

Modus yang sering terjadi adalah: (a) menempelkan label resmi seperti ("Kemnaker", "BPJS", "Pospay"), (b) mengajak bertindak segera dengan pemberitahuan batas waktu atau kata seperti "segera cek", (c) mengarahkan ke situs/*form* yang tidak resmi, (d) meminta data pribadi seperti nama, NIK, dan nomor kontak/Telegram, serta (e) kadang mengarahkan ke kode QR atau biaya palsu. Beberapa jaringan pengecekan fakta seperti Mafindo/TurnBackHoax, Komdigi, dan Jabar Saber Hoaks telah mencatat ulang tahapan ini.

Aktor utamanya bukan bot (mesin) sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa manusia lebih banyak bertindak dalam menyebarkan berita palsu dibandingkan bot; karena keterlibatan kognitif yang rendah, orang cenderung mengklik atau menyebarkan tautan tanpa memverifikasi kebenarannya.

Grup dan halaman Facebook memberikan audiens yang sudah siap digunakan untuk menyampaikan narasi "bantuan cair" dan memudahkan proses berbagi ulang. Kasus "INFO Terkini" menunjukkan adanya tautan Facebook dan arsip yang disebarluaskan; indikator "sc: Facebook" dalam metadata periksa-fakta juga memverifikasi sumber platform tersebut.

Secara keseluruhan, Facebook global mengurangi kemudahan melihat berita, tetapi di Indonesia media sosial tetap menjadi jalur utama untuk mendapatkan berita, hal ini justru dimanfaatkan oleh penipu dengan mengisi konten bukan berita seperti iklan atau artikel menarik yang berpura-pura membahas isu publik.

Mengikat ke Literatur: Mengapa Tautan BSU Mudah Viral?

1. *Novelty & emosi*: janji uang tunai cepat bisa membuat orang merasa terkesan, sehingga lebih mudah membagikannya.
2. *Cognitive effort*: "lazim, tidak memihak", pemikiran yang dalam lebih penting daripada kebiasaan memihak partai dalam hal seperti BSU.
3. *Arsitektur platform*: fitur seperti umpan (*feed*) dan grup memudahkan penyebaran berita komersial atau berita menggoda klik; penelitian menunjukkan interaksi berita semacam itu bisa lebih banyak dibandingkan media utama di Facebook.
4. *Deteksi otomatis kurang efektif*: tinjauan ilmiah menyoroti kesulitan dalam mendeteksi konten yang sengaja menipu dan sinyal sosial yang bising membuktikan pentingnya verifikasi manusia dan kecerdasan hibrida.

Penulis membuat tabel contoh kasus dengan 7 baris sederhana per sumber (Juni–Agustus 2025). Tabel tersebut menampilkan tanggal, ringkasan klaim, kategori, platform (Facebook), dan sumber.

Sumber-sumber spesifik untuk tabel meliputi: Komdigi (tautan untuk cek/pencairan BSU Agustus 2025; tautan cek BSU tanpa NIK; tautan BSU untuk karyawan dan guru honorer 2025), TurnBackHoax (tautan pendaftaran; cek tanpa NIK; Pospay; klaim Rp1,7

juta; klaim untuk TKI), serta Jabar Saber Hoaks (klarifikasi Rp1,7 juta dan tautan; klarifikasi tautan BSU karyawan dan guru honorer).

Tabel 1. Temuan Hoaks/Disinformasi BSU di Facebook (Juni–Agustus 2025)

Tanggal	Klaim Singkat	Kategori	Platform	Sumber	URL
21-06-2025	Tautan BSU untuk karyawan & guru honorer 2025	Hoaks/ Impostor	Facebook	Komdigi	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-tautan-bantuan-subsidi-upah-untuk-karyawan-dan-guru-honorer-2025
30-06-2025	Pendaftaran BSU karyawan & guru honorer	Penipuan/ Impostor	Facebook	TurnBackHoax	https://turnbackhoax.id/2025/06/30/penipuan-tautan-pendaftaran-bsu-karyawan-dan-guru-honorer/
18-07-2025	Tautan pendaftaran BSU tahap II	Penipuan/ Fake Content	Facebook	TurnBackHoax	https://turnbackhoax.id/2025/07/18/penipuan-tautan-pendaftaran-bantuan-subsidi-upah/
21-07-2025	Tautan Pospay untuk cek pencairan BSU	Impostor	Facebook	TurnBackHoax	https://turnbackhoax.id/2025/07/21/penipuan-tautan-pospay-untuk-cek-pencairan-bsu/
22-07-2025	Kemnaker salurkan BSU Rp1,7 juta	Penipuan	Facebook	TurnBackHoax	https://turnbackhoax.id/2025/07/22/penipuan-kemnaker-salurkan-bsu-sebesar-rp17-juta/
23-07-2025	BSU untuk TKI Rp100 juta	Penipuan	Facebook	TurnBackHoax	https://turnbackhoax.id/2025/07/23/penipuan-pemerintah-cairkan-bantuan-subsidi-upah-bsu-untuk-tki/
21-08-2025	Tautan pencairan BSU Agustus 2025	Hoaks	Facebook	Komdigi	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-tautan-untuk-pencairan-bsu-periode-agustus-2025

Bagaimana lembaga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan dan Kantor Pos Indonesia (Pospay) menanggulangi berita bohong yang tersebar di media sosial facebook terkait Bantuan subsidi upah (BSU) ?

Menanggulangi Berita Bohong Yang Tersebar di Media Sosial Facebook Terkait Bantuan subsidi upah (BSU)

Penyebaran berita bohong mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) di media sosial, khususnya Facebook, menjadi tantangan serius dalam literasi digital di Indonesia. Tiga aktor utama yang aktif menanggulangi isu ini adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), TurnBackHoax/Mafindo, dan Jabar Saber Hoaks.

Pertama, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai lembaga pemerintah sangat penting dalam menangani hoaks terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU). Sebagai lembaga resmi yang mengurus komunikasi dan teknologi informasi, Kominfo memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan terhadap berita palsu yang beredar di media sosial, seperti Facebook. Kedudukan ini membuat semua pernyataan yang dikeluarkan oleh Kominfo dianggap lebih tepercaya dibandingkan sumber informasi dari pihak lain.



Gambar 2. pemberitaan terkait penipuan BSU untuk karyawan dan guru honorer 2025, pada postingan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

Sumber: https://www.komdigi.go.id/berita/berita-komdigi/detail/awas-hoaks-bantuan-subsidi-untuk-karyawan-dan-guru-honor-2025?utm_source=chatgpt.com

Salah satu tindakan nyata yang dilakukan Kominfo adalah menerbitkan pernyataan resmi pada 21 Juni 2025 yang menjelaskan bahwa tautan untuk mendaftar BSU bagi pegawai dan guru honorer adalah palsu dan tidak dikeluarkan oleh lembaga pemerintah manapun. Pernyataan ini tidak hanya berupa penolakan terhadap pernyataan yang salah, tetapi juga menunjukkan sikap pemerintah dalam melindungi masyarakat dari kejahatan digital yang mengatasnamakan lembaga negara. Selain itu, Kominfo terus memperkuat upaya mengatasi hoaks dengan menerbitkan informasi tambahan pada 11 Juli 2025 terkait tautan hoaks yang memungkinkan pemeriksaan status penerima BSU tanpa menggunakan NIK, serta pada 21 Agustus 2025 tentang tautan palsu pencairan BSU pada bulan Agustus.

Pola ini menunjukkan bahwa Kominfo secara aktif mengantisipasi dan merespons hoaks yang terus berkembang, sekaligus memberikan edukasi kepada publik tentang cara membedakan situs resmi dan tautan penipuan. Dengan demikian, upaya Kominfo bukan hanya reaksi terhadap masalah, tetapi juga tindakan pencegahan.

Dengan memberikan klarifikasi yang terus-menerus dan terstruktur, Kominfo menyediakan informasi yang benar langsung dari otoritas negara. Ini memungkinkan masyarakat memiliki referensi yang jelas, bisa dipercaya, ketika menghadapi informasi salah di Facebook. Langkah ini sesuai dengan konsep komunikasi pengembangan yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan saluran komunikasi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat untuk memperkuat ketahanan informasi masyarakat.

Kedua, peran Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) melalui platform TurnBackHoax menunjukkan bagaimana organisasi masyarakat sipil bisa berkontribusi secara strategis dalam mengatasi hoaks terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU). Berbeda dengan Komdigi yang merupakan lembaga pemerintah, Mafindo menggandeng masyarakat langsung dalam mengungkap dan memeriksa berita palsu di media sosial. Mereka mendorong orang-orang untuk melaporkan, memverifikasi, dan membahas berita yang mencurigakan. Pendekatan ini menunjukkan kerja sama yang horizontal, sehingga masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses pengecekan informasi.



Gambar 3. pemberitaan terkait penipuan BSU untuk pendaftaran BSU bagi karyawan dan guru honorar, pada postingan situs basis data “TurnBackHoax”

Sumber: https://turnbackhoax.id/2025/06/30/penipuan-tautan-pendaftaran-bsu-karyawan-dan-guru-honorar/?utm_source=chatgpt.com

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ikut serta dalam mencari solusi. Pada 30 Juni 2025, TurnBackHoax menemukan dan mencatat kasus penipuan digital berupa tautan palsu untuk pendaftaran BSU yang menyebar di Facebook (Mafindo/TurnBackHoax, 2025a). Dalam laporan tersebut, TurnBackHoax tidak hanya menghapus atau menandai informasi palsu, tetapi juga memberikan analisis tentang cara para penipu mengelabui masyarakat, seperti menggunakan logo lembaga resmi atau mengarahkan orang ke situs yang tidak sah. Analisis ini penting karena membantu masyarakat memahami bagaimana cara penipu melakukan manipulasi digital.

Selanjutnya, pada 11 Juli 2025, TurnBackHoax kembali memberikan klarifikasi terkait tautan palsu untuk cek status penerima BSU tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mereka juga memperingatkan bahaya yang terjadi jika orang memasukkan data pribadi ke situs yang tidak resmi (Mafindo/TurnBackHoax, 2025b). Peringatan ini menunjukkan bahwa Mafindo tidak hanya fokus pada kebenaran informasi, tetapi juga pada pemahaman tentang keamanan data pribadi. Ini adalah isu penting dalam menjaga keamanan digital di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis keterlibatan masyarakat dan analisis yang terbuka, TurnBackHoax/Mafindo membantu melengkapi upaya pemerintah dalam merespons hoaks.

Upaya ini sesuai dengan prinsip komunikasi partisipatif, di mana proses berkomunikasi tidak hanya dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga dari masyarakat ke pemerintah. Ini menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan terpercaya.

Ketiga, Jabar Saber Hoaks, sebuah unit layanan yang menerima aduan dan memberikan klarifikasi tentang hoaks, berperan penting dalam mengurangi penyebaran informasi palsu terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU). Berbeda dengan Komdigi yang bersifat nasional dan TurnBackHoax/Mafindo yang bergantung pada partisipasi masyarakat, Jabar Saber Hoaks fokus pada kebutuhan di tingkat lokal Jawa Barat. Fungsi utamanya adalah sebagai platform layanan yang menyediakan saluran pengaduan, memverifikasi informasi, serta menyebarkan klarifikasi. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang bisa dipercaya untuk mematahkan hoaks di wilayahnya.



Gambar 4. pemberitaan terkait penipuan BSU sebesar Rp. 600.000 yang mengatasnamakan Pospay PT. Pos Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada postingan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat platform berbasis website bernama “Jabar Saber Hoaks”

Sumber:

https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN003468/Social%20Media%20Da%27wah%20Literacy%20on%20the%20West%20Java%20Saber%20Hoaks%20Program?utm_source=chatgpt.com

Pada 17 Juli 2025, Jabar Saber Hoaks merilis klarifikasi resmi terkait hoaks yang menyebarkan informasi palsu mengenai “bantuan subsidi upah Rp1,7 juta” lengkap dengan tautan palsu untuk pendaftaran (Jabar Saber Hoaks, 2025a). Dalam klarifikasi ini, mereka menjelaskan secara rinci tipe konten palsu tersebut (*impostor content*) dan menekankan bahaya penipuan digital yang mencoba menipu orang awam. Kebutuhan untuk menggunakan istilah teknis seperti *impostor content* menunjukkan upaya Jabar Saber Hoaks tidak hanya untuk menyangkal informasi palsu, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara-cara penipuan digital.

Peran Jabar Saber Hoaks memperkuat sistem pengendalian hoaks dengan berkolaborasi dengan lembaga pusat (Komdigi) serta inisiatif masyarakat (Mafindo/TurnBackHoax).

Melalui pemberian klarifikasi berdasarkan bukti dan penyediaan saluran komunikasi yang mudah diakses, Jabar Saber Hoaks membantu menciptakan lingkungan informasi yang sehat di daerah. Hal ini juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjaga ketahanan digital.

Penyebaran informasi palsu mengenai BSU melalui Facebook dan faktor kejutan serta emosi. Temuan yang menyatakan berita palsu lebih cepat menyebar dibandingkan berita benar, seperti yang dicatat oleh Vosoughi, Roy, dan Aral (2018), sangat relevan dengan kasus BSU. Janji mendapatkan uang tunai secara cepat mendatangkan harapan dan rasa penasaran, sehingga memicu masyarakat untuk membagikan *link* tanpa memeriksa kebenarannya.

Kerentanan masyarakat terhadap hoaks disebabkan oleh rendahnya kemampuan berpikir analitis. Pennycook dan Rand (2019) menekankan bahwa tidak hanya bias politik yang membuat masyarakat mudah terkena hoaks BSU, tetapi juga karena kurangnya keterampilan berpikir kritis dan analitis.

Hal ini menunjukkan pemahaman pentingnya literasi digital sebagai upaya pencegahan. Kerangka *information disorder* Menurut Wardle dan Derakhshan (2017), hoaks BSU dapat dikategorikan sebagai disinformasi berbentuk konten penipuan. Penipu sengaja menyerupai institusi resmi seperti Kemnaker, BPJS, dan Pospay untuk menipu masyarakat. Peran arsitektur platform sosial dalam mempercepat penyebaran hoaks. Shu dan rekan-rekan (2017) menjelaskan bagaimana fitur Facebook seperti *feed*, grup, dan algoritma memperkuat penyebaran informasi menyesatkan.

Hal ini sesuai dengan pola penyebaran *link* palsu BSU yang cepat melalui grup Facebook. Peran manusia dibandingkan bot dalam penyebaran hoaks. Studi Vosoughi dan kawan-kawan (2018) menegaskan bahwa hoaks lebih sering dibagikan oleh manusia daripada bot. Rendahnya keterlibatan berpikir membuat orang mudah klik dan bagikan tanpa memeriksa sumber. Tantangan dalam mendeteksi hoaks secara otomatis.

Lazer dan tim (2018) menyoroiti kesulitan sistem otomatis dalam mengenali hoaks yang dirancang untuk menyerupai konten asli. Hal ini menjelaskan pentingnya klarifikasi manual dari Komdigi, Jabar Saber Hoaks, dan Mafindo. Kebutuhan literasi digital dan komunikasi partisipatif. McQuail (2010) menekankan pentingnya komunikasi massa yang akuntabel dan melibatkan masyarakat untuk menjaga kualitas informasi

Dalam konteks ini, tindakan Jabar Saber Hoaks dan Mafindo mencerminkan peran komunikasi partisipatif dalam menangkal hoaks BSU. Dampak sosial dari berita palsu terhadap masyarakat. Vosoughi dan kawan-kawan (2018) serta Pennycook dan Rand (2019) menunjukkan bahwa informasi palsu tidak hanya memengaruhi persepsi individu, tetapi juga mengurangi kredibilitas institusi secara kolektif. Kasus BSU menjadi contoh nyata bagaimana hoaks dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Simpulan

Pola komunikasi yang digunakan dalam menyebarkan berita bohong di media sosial facebook dengan cara adanya penyebaran berita palsu tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) di media sosial, terutama Facebook, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor itu meliputi kebaruan informasi, perasaan harapan akan bantuan yang cepat, serta struktur platform Facebook yang memudahkan berita palsu menyebar lewat grup dan halaman. Orang yang menyebarkan berita palsu menggunakan strategi yang menyerupai lembaga resmi. Mereka meniru logo, gaya berbicara, dan identitas lembaga seperti Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau Pospay. Cara mereka adalah dengan menggunakan tautan palsu, meminta orang bertindak segera, meminta data pribadi, serta mengarahkan ke situs tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan kelemahan pikiran masyarakat yang cenderung tidak memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Dengan demikian, berita palsu tentang bantuan subsidi upah (BSU) di Facebook memiliki ciri-ciri seperti membuat orang merasa terpojok (impostor), menciptakan perasaan emosional, dan menarik klik secara cepat.

Cara yang dilakukan oleh lembaga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan dan Kantor Pos Indonesia (Pospay) menanggulangi berita bohong yang tersebar di media sosial facebook terkait bantuan subsidi upah (BSU) dengan menyikapi secara bersinergi antara otoritas negara dan Masyarakat sipil, pihak resmi dan lembaga masyarakat melakukan langkah yang berbeda namun saling menyempurnakan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memainkan peran sebagai otoritas negara dengan memberikan pernyataan resmi, memberi edukasi kepada masyarakat tentang tanda tautan palsu, serta terus memperbarui informasi agar masyarakat memiliki sumber kebenaran yang terpercaya. Mafindo melalui program TurnBackHoax menggunakan pendekatan partisipatif dengan meminta partisipasi masyarakat untuk

membantu klarifikasi, menganalisis modus penipuan, serta meningkatkan kesadaran mengenai literasi digital dan perlindungan data pribadi. Di tingkat lokal, Jabar Saber Hoaks berperan sebagai media pengaduan dan klarifikasi yang cepat tanggap terhadap isu di wilayah Jawa Barat, serta menggunakan istilah teknis seperti *impostor content* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara kerja penipuan digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa mengatasi berita palsu tentang bantuan subsidi upah (BSU) di Facebook membutuhkan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga lokal. Pemerintah memberikan kedaulatan resmi, organisasi masyarakat sipil memperkuat peran masyarakat, sedangkan lembaga lokal mempercepat distribusi klarifikasi di tingkat daerah. Dengan kerja sama yang kolaboratif seperti ini, ekosistem informasi yang sehat dapat dibangun sehingga masyarakat lebih tahan terhadap misinformasi.

Daftar Pustaka

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- APJII. (2024, February 7). APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- DataReportal. (2025, February 25). Digital 2025: Indonesia. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. (2025, June 21). Isu hoaks/disinformasi 21 Juni 2025. <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/isu-hoaks-disinformasi-21-juni-2025>
- Jabar Saber Hoaks. (2025a, July 17). Bantuan subsidi upah Rp1,7 juta + tautan pendaftaran adalah impostor content. <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN003460>
- Jabar Saber Hoaks. (2025b, August 21). Tautan BSU untuk karyawan & guru honorer 2025 adalah tidak benar. <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN003317>
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). (2025a, June 21). [HOAKS] Tautan Bantuan Subsidi Upah untuk Karyawan dan Guru Honorer 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-tautan-bantuan-subsidi-upah-untuk-karyawan-dan-guru-honorer-2025>
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). (2025b, July 11). [HOAKS] Tautan cek BSU 2025 tanpa nomor KTP. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-tautan-cek-bsu-2025-tanpa-nomor-ktp>

- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). (2025d, August 21). [HOAKS] Tautan untuk pencairan BSU periode Agustus 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-tautan-untuk-pencairan-bsu-periode-agustus-2025>
- Kompas.com. (2025, August 21). [Cek Fakta] Hoaks tautan pencairan BSU Agustus 2025. <https://www.instagram.com/p/DNndxZ-T6KM>
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., ... & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Liputan6.com. (2025, August 19). Cek fakta: Tidak benar link untuk periksa penerima BSU 2025 lewat Pospay. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/6136309>
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of human communication* (11th ed.). Waveland Press.
- Mafindo/TurnBackHoax. (2025a, June 30). [Penipuan] Tautan “Pendaftaran BSU Karyawan dan Guru Honorer”. <https://turnbackhoax.id/2025/06/30/penipuan-tautan-pendaftaran-bsu-karyawan-dan-guru-honorer/>
- Mafindo/TurnBackHoax. (2025b, July 11). [Penipuan] Tautan cek status penerima “BSU” tanpa NIK. <https://turnbackhoax.id/2025/07/11/penipuan-tautan-cek-status-penerima-bantuan-subsidi-upah-tanpa-nik/>
- Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). (2025, July 22). [Penipuan] Kemenaker salurkan BSU sebesar Rp1,7 juta. TurnBackHoax. <https://turnbackhoax.id/2025/07/22/penipuan-kemenaker-salurkan-bsu-sebesar-rp17-juta/>
- McQuail, D. (2010). *McQuail’s mass communication theory* (6th ed.). Sage.
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. *Cognition*, 188, 39–50. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.011>
- Pontianak Post. (2025, July 11). [Cek Fakta] Hoaks tautan pendaftaran Bantuan Subsidi Upah. <https://pontianakpost.jawapos.com/cek-fakta/1466315419/cek-fakta-hoaks-tautan-pendaftaran-bantuan-subsidi-upah>
- Reuters Institute. (2024). Digital News Report 2024 (Full report). https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2024-06/RISJ_DNR_2024_Digital_v10%20lr.pdf
- Shu, K., Sliva, A., Wang, S., Tang, J., & Liu, H. (2017). Fake news detection on social media: A data mining perspective. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, 19(1), 22–36. <https://doi.org/10.1145/3137597.3137600>
- Tamburaka, A. (2013). *Metode penelitian komunikasi: Teori dan praktek*. Graha Ilmu.

-
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wardle, C. (2018). The need for smarter definitions and practical, timely empirical research on information disorder. *Digital Journalism*, 6(8), 951–963. <https://doi.org/10.1080/21670811.2018.1502047>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe. <https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html>